

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi menjadi salah satu sistem pemerintahan negara terbaik oleh untuk mencapai cita-cita negara, sehingga banyak negara yang melakukan perubahan sistem politik dari negara yang sebelumnya tidak demokrasi, menjadi negara yang demokrasi, salah satunya adalah negara Indonesia. Keberadaan sistem demokrasi memberikan kebebasan diberbagai bidang telah memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok dan bahkan aliran dalam keagamaan untuk tumbuh dan berkembang. Jika dimaknai sebagai sebuah ideologi sebuah negara, maka negara tersebut harus menyerahkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat, sehingga rakyatlah yang akan membentuk pemerintah, dan membentuk kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat, sebab dalam demokrasi segala sesuatu nya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi lahir di Yunani pada abad 5 SM dan di desain ulang oleh para intelektual dan kaum gerejawan sebagai bentuk pemberontakan terhadap kekuasaan otoriter gereja yang kejam sepanjang abad pertengahan. Demokrasi yang dibangun oleh orang-orang Barat merupakan demokrasi yang dibuat atas dasar sekulerisme yaitu pemisahan antara agama dan negara, dan kebebasan rakyat yang seluas luasnya dalam beragama, berpendapat, kepemilikan dan

berperilaku.<sup>1</sup> Kemudian para imperialis barat demokrasi ditransfer keseluruh negeri jajahan mereka, termasuk kedunia Islam dan terjadilah sekulerisasi negara-negara umat Islam.

Ketika istilah demokrasi dipakai sebagai salah satu sistem politik dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka terjadilah perdebatan yang hangat dikalangan umat islam. Sebab dalam ajaran islam, demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang baik, tetapi hal ini masih menjadi perdebatan yang hangat dikalangan intelektual muslim. Sebagian dari kalangan intelektual muslim memandang bahwasannya demokrasi dan Islam merupakan dua hal yang sejalan dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwasannya demokrasi dan islam adalah dua hal yang berlawanan, di antaranya: <sup>2</sup>

*Pertama*, tokoh intelektual Muslim Fahmi Huwaidi, yang merupakan tokoh intelektual Muslim yang menerima konsep demokrasi. Menurutnya, demokrasi merupakan sebuah pemilu yang jujur, adil dan kompetitif serta akuntabilitas penguasa, dengan sistem kelembagaan seperti penerapan metode mayoritas, multi partai, penghormatan atas hak-hak minoritas, kebebasan oposisi dan pers, dapat dilihat bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang menolak di diktatoran dan otoritarianisme. Oleh karena itu, Huwaidi mengatakan bahwa demokrasi sangat dekat dengan jiwa Islam dan substansinya sejalan dengan islam.

*Kedua*, tokoh intelektual muslim yang mengatakan bahwa demokrasi dan Islam merupakan dua hal yang berlawan atau menolak demokrasi. Syakh Fadhallah Nuri, satu kunci demokrasi yaitu persamaan semua warga negara adalah *impossible*

---

<sup>1</sup> Basri, Muinudinillah. 2015. Hukum Demokrasi Dalam Islam. *Jurnal Suhuf*. Vol 27. No 1 hal 2

<sup>2</sup> Sukran Kamil, 2002. *Islam dan Demokrasi "Telaah Konseptual dan Historis"*. Hal 47-61

dalam islam. Misalnya antara yang beriman dengan yang tidak beriman, kaya-miskin dan *faqih* (ahli hukum islam). Dia juga menolak legilasi oleh manusia. Dalam Islam tidak ada seorang pun yang di izinkan mengatur hukum, sedangkan dalam demokrasi diatur paham konstitusional yang menjadi bagian dari demokrasi, oleh karena itu demokrasi bertentangan dengan islam.

Penjelasan dua kelompok Intelektual Muslim diatas sejalan dengan pandangan kaum salafi<sup>3</sup> yang mana kaum Salafi sendiri ada yang menerima demokrasi dan ada yang menolak sistem demokrasi. Menurut manhaj Salaf<sup>4</sup>, Islam bukan hanya mengatur cara beragama atau beribadah seseorang, namun islam merupakan suatu ideologi yang harus diperjuangkan agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya tetap terjaga. Yang menjadi tujuan dalam Islam ialah agar agama hidup dalam kehidupan masyarakat, ketatanegaraan, pemerintahan dan perundang-undangan, sehingga islam disebut sebagai agama *rahmatallil'alamin*.

---

<sup>3</sup> Kata *salaf* secara etimologis memiliki arti terdahulu, atau kelompok pendahulu. Secara terminologis, kata *salaf*, menurut para ulama adalah sekitar sahabat, *Tabi'in*, dan *Tabi' al-Tabi'in* yang hidup di masa (tiga abad pertama) yang dimuliakan dari kalangan para Imam yang telah diakui keimaman, kebaikan, kepahaman, dan keteguhannya dalam menjadikan Sunnah sebagai pedoman hidupnya, menjauhi *bid'ah*, dan dari orang-orang yang telah disepakati oleh umat tentang keimaman mereka serta keagungan dan kedudukan mereka dalam agama. Lebih lanjut silahkan rujuk “Abdullah bin Abdul Hamid Al- Atsari, Intisari Aqidah Ahl Ul Sunnah-Waljama'ah. (Jakarta Pustaka Imam As Syafi'i. 2007) hal 39”

<sup>4</sup> Salafi bukanlah partai politik dan mazhab baru., melainkan metode atau manhaj yang sempurna dalam memahami dan melaksanakan segala sesuatu atau tindakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Gerakan kaum Salafi merupakan sebuah gerakan pemurnian (*purifikasi*) terhadap ajaran agama yang dirasa sudah banyak mengalami penyimpangan. Gerakan kaum salafi menekankan adanya pembersihan (*tasfiyah*) dan pendidikan (*tarbiyah*) dengan ajaran yang benar. *Purifikasi* ajaran Islam juga sering disebut dengan istilah Salafiyah, yang secara terminologi, disebut sebagai khazanah ilmu yang bersumber dari pemahaman secara mendalam terhadap ajaran salafus shalih, yang mengacu pada metodologi berpikir kembali pada sumber pemikiran Islam yaitu al-Qur'an, kehidupan Nabi Muhammad SAW (Sunnah atau Hadits) dan generasi awal umat Islam. Lebih lanjut silahkan rujuk M. Imadadun Rahmat. Arus Baru Islam Radikal : Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia ( Jakarta: Erlangga, 2009 )

Salafi berdakwah dari beberapa daerah dan lapisan masyarakat<sup>5</sup> dengan tetap menjaga kemurnian Islam, yang terwujud dalam kalimat *rahmatallil'amin..* Menurut Kaum Salafi gerakan *hizbiyyah* (kelompok partai atau partai yang berdakwah melalui jalur politik) merupakan sesuatu hal yang tidak ada dalam ajaran agama islam, tidak ada dasar hukumnya dalam islam. Gerakan *Hizb* dinilai telah mengabaikan tujuan utama dalam berdakwah dan hanya terfokus kepada kepentingan pribadi saja. Oleh sebab itu, kaum Salafi menolak bentuk dakwah melalui jalur politik karena dianggap sebagai kelompok pragmatisme kekuasaan.

---

<sup>5</sup> Gerakan Awal kemunculan Salafi di Indonesia dengan pemikiran yang Salafiyah terjadi pada tahun 1980-an bersamaan dengan dibukanya Lembaga Pengajaran Bahasa Arab (LPBA) di Jakarta, yang kemudian berubah menjadi LIPIA (Lembaga Ilmu Islam dan Sastra Arab). LIPIA merupakan cabang dari Universitas Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Pada awal tahun 1980 Muhammad Ibn Saud University telah memiliki cabang di Djibouti dan Mauritania kemudian memutuskan membuka cabang ketiga di Indonesia. Pasca Orde Baru runtuh, gerakan Salafi aktif kurang lebih dua tahun (2000-2002). Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jama'ah (FKAWJ) yang didirikan di Solo, pada tanggal 12 Februari 1998. Forum ini memobilisasi massa dari Laskar Jihad yang memiliki peran penting dalam perkembangan Salafi di Indonesia. Sebab, Laskar Jihad mendapat banyak dukungan dari masyarakat muslim Indonesia sebagai relawan untuk berjihad di Ambon dan Maluku. Selain terlibat dalam konflik Maluku, Laskar Jihad juga mengirim 700 relawan ke Poso, Sulawesi Tengah. Keterlibatan Laskar Jihad dalam berbagai konflik komunal di Indonesia telah menunjukkan gerakan Salafi sebagai gerakan sosial Indonesia yang agresif dan berhasil memobilisasi massa. Di sisi lain, munculnya Laskar Jihad menimbulkan ketegangan antara kaum Salafi sendiri bahkan antar gerakan Islam lainnya. Tekanan yang serius dihadapi Laskar Jihad pada saat itu adalah berubahnya kebijakan pemerintah dalam menangani konflik. Pemerintah berusaha menangani konflik dengan mengirim tentara dan tokoh politik ke daerah konflik. Laskar Jihad hanya bertahan dua tahun karena dibubarkan sehingga para relawan jihad kembali ke daerah asalnya. Pada tanggal 12 Oktober 2002, Laskar Jihad dibubarkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Rabi' bin Hadi Al Madkhali (tokoh Salafi Yaman) yang merupakan panutan para aktivis Salafi di Indonesia. Alasan pembubaran karena Laskar Jihad menyimpang dari tujuan semula untuk berjihad membela kaum muslimin di Maluku. Peristiwa tersebut merupakan tanda-tanda dari perpecahan Laskar Jihad. Lebih lanjut silakan rujuk M. Imadadun Rahmat. Arus Baru Islam Radikal : Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia ( Jakarta: Erlangga, 2009 )

Dalam tataran sejarah, pengelompokan Salafi memiliki banyak versi, ada yang mengelompokkan Salafi sebagai suatu doktrin keagamaan<sup>6</sup> dan ada Salafi yang diklasifikasikan menjadi beberapa model gerakan yang bisa dijelaskan menggunakan konstelasi politik yang berkembang saat ini.<sup>7</sup> Pertama, *Salafi jihadis*. Kelompok ini menyerukan jihad dengan kekerasan untuk mewujudkan eksistensi politik yang berdasarkan Islam dalam bentuk kekhalifahan. Mereka digolongkan sebagai kelompok takfiri, karena mengkafirkan penguasa muslim yang tidak menjalankan hukum Islam di pemerintahannya. Kelompok ini dipengaruhi oleh Sayyid Qutb yang membagi negara menjadi dua macam, konsep negara *hakimiyyah* dan negara *jahiliyyah*.

---

<sup>6</sup> Berikut adalah varian hasil dari klasifikasi para pengkaji salafisme yang seringkali mengarah pada *salafiyah* sebagai sebuah gerakan dan doktrin keagamaan. ***Al-Salafiyah al-Tarikhiah***, Kelompok ini berusaha keras untuk mengedalikan kepemimpinan atas umat Islam, yaitu kelaziman yang membawa misi besar demi tercapainya sebuah tujuan. ***Al-Salafiyah al-Wahabiyah***, kelompok ini tidak terlalu keras dalam memberikan stereotip untuk memusuhi orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, seperti orang-orang yang meminta pertolongan orang-orang yang sudah meninggal dunia, para wali dan leluhur mereka. ***Al-Salafiyah al-Ishlahiyah***, kelompok ini, merupakan kelompok Salafi yang konstruktif dalam membangun ideologi umat Islam yang lebih maju sesuai dengan perkembangan peradaban. Ide dan gagasan dari kelompok ini seiring perkembangan jaman bergeser menjadi gerakan *madhab* yang menegakkan prinsip “ *la yashluhu akhir hadzihi al-ummah illa bima shaluha bihi awwaluha* ” yang artinya : tidak akan pernah menjadi baik umat ini, kecuali mereka menempuh jalan kebaikan generasi awalnya. ***Al-Salafiyah al-Ta'sliyah***. Kelompok ini merasa yakin mampu menyajikan Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam yang asli, dan bebas dari unsur-unsur *bid'ah*.. Prioritas utama kelompok ini terletak pada perubahan sosial dari pada sasaran pemikiran, karena politik dalam perspektif kelompok ini merupakan realitas yang paling memungkinkan untuk merealisasikan bahwa, Islam adalah agama dan negara. Meskipun demikian, gerakan ini sebenarnya mengkombinasikan antara yang *al-madani* (sipil atau sosial) dan yang *al-siyasi* (penguasa atau politik). ***Al-Salafiyah al-Jihadiyah al-Takfiryah***, kelompok ini mengusung ide dan gagasan reformasi dan kebangkitan Islam melalui nilai-nilai al-Qur'an, namun gerakan-gerakan ini memberikan karakter negatif pada Islam. Simbolisasi Islam dalam wajah yang garang dan dalam bentuk kekerasan, konflik dan kebencian terhadap orang atau kelompok lain. Lebih lanjut silahkan rujuk Abdul Matin bin Salaman. 2017. Gerakan Salafiyah: Islam, Politik, dan Rigiditas Interpretasi Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. XIV(2). Hal 137

<sup>7</sup> Bernard, Haykel . 2003. *Revival and Reform in Islam: The Legacy Of Muhammad Shawkani*. (Cmbrudge: University. Hal 49-50

Kedua, *Salafi Sururiyyah*. Kelompok yang mirip dengan kelompok pertama, aktif dalam politik, namun tidak dengan mengambil jalan kekerasan. Kelompok ini mengambil jalur pentingnya kesadaran politik sebagaimana Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini diwakili oleh Shahwa Sururi di Yaman dan Kuwait. Abd al-Rahman Abd al-Khaliq, seorang Mesir lulusan Universitas Madinah yang memimpin Jam'iyat Ihya' al-Turath al-Islami. Dia menyatakan bahwa inilah salafi yang terorganisir (*al-salafiyyah al-tanzimiyyah*) guna mencapai kekuatan dan pengaruh politik.

Ketiga, *Salafi Apolitik*. Kelompok ini diidentikkan dengan Nasir al-Din al-Albani, Jamis Madkhali, dan Rabi' Madkhali. Mereka menjauhi semua bentuk politik, menjauhi jalur dan tindakan kekerasan, karena ini merupakan sumber fitnah. Mereka digolongkan sebagai salafiyah skolastik (*al-salafiyyah al-ilmiyyah*), yang mengutamakan pemurnian Islam.

Di Indonesia secara garis besar kelompok Salafi terbagi menjadi dua kelompok:<sup>8</sup> *Pertama, Salafi Yamani*, merupakan kelanjutan Laskar Jihad, yang berafiliasi kepada Syaikh Salafi Yaman, yang mana para ulamanya melarang jamaa'ahnya untuk memilih presiden dan pejabat pemerintahan dalam sistem pemilu serta menyebut bahwa saudara sesama muslim yang terlibat maka disebut telah melakukan perilaku bid'ah.

*Kedua, Salafi Sururi atau Haraki*, Kaum Salafi Sururi aktif dalam politik, karena bagi mereka itu merupakan salah satu ikhtiar dalam meminimalisir kemudharatan. Mereka memiliki prinsip-prinsip Ikhwanul Muslimin. Disebut

---

<sup>8</sup> Sefriyono. *Gerakan Kaum Salafi*. (Padang: Imam Bonjol Press, 2015)

sururi sebab yang dianggap menjadi perintis gerakan ini ialah Muhammad Surur, dakwah Salafi Sururi ini berpola pada pergerakan.

Pada penelitian Ahmad Bunyan Wahib dengan judul Gerakan Dakwah Salafi Paska Laskar Jihad di Banyumas, Jawa Tengah menggambarkan bahwa kaum Salafi sebagai gerakan anti Barat, yang tidak mau mengamalkan dan melakukan segala bentuk ajaran serta ideologi yang berkaitan dengan Barat.<sup>9</sup>

Sedangkan pada penelitian Lilis Agustulistiana, dengan judul Perilaku Politik Kaum Salafi (Respon Terhadap Demokrasi di Kabupaten Blitar)<sup>10</sup> menggambarkan bahwa perilaku politik kaum salafi dalam merespon demokrasi di Indonesia menyatakan diri bahwa sistem demokrasi merupakan sistem yang kurang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi kaum salafi tetap berperan aktif dalam demokrasi di Indonesia.<sup>11</sup>

Dari dua penelitian tersebut jelas bahwa kebaruaran yang peneliti hadirkan pada penelitian kali ini terdapat pada fokus penelitian skripsi ini yang membahas mengenai perilaku politik dan partisipasi politik Kaum Salafi Yamani dan Sururi

---

<sup>9</sup> Ahmad Bunyan Wahib. Gerakan Dakwah Salafi Paska Laskar Jihad. *Jurnal Elektronik Reasearch Network*. Vol. 3 No.1 hal 25

<sup>10</sup> Lilis Agustulistiana. *Perilaku Politik Kaum Salafi ( Respon Terhadap Demokrasi di Kabupaten Blitar*. Institute Agama Islam Sunan Ampel Surabaya.

<sup>11</sup> Salafiyah diklasifikasikan oleh Jhom L. Eposito menjadi tiga kategori: *Pertama*, Salafiyah klasik yang dipelopori oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal (780-855). Secara substansial terfokus pada prinsip keutamaan teks wahyu diatas akal manusia bahwa tidak ada kontradiksi antara akal dan al-Qur'an. *Kedua*, Salafiyah pra-modern yang dipelopori oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab (1703-1792), kelompok ini berkeinginan memurnikan semenanjung Arab dan praktek non Islam serta membangun negara Islam yang meneladani negara yang didirikan Nabi, serta memiliki karakter khusus untuk memerangi segala bentuk syirik dan khurafat, menyerukan kemurnian tauhid, serta memerangi bid'ah. *Ketiga*, Salafiyah modern yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al Afghani (1839-1892), Muhammad Abduh (1849-1905), dan Rasyid Ridha (1865-1935), kelompok ini memiliki keinginan untuk melakukam *purifikasi* ajaran agama Islam serta mereformasi moral, budaya dan politik umat muslim. Jamaluddin Al Afghani mengatakan kemurnian Islam terletak pada masa kekhalifahan.

dalam merespon demokrasi di Kota Padang. Penelitian ini tidak hanya membahas satu kelompok Salafi saja melainkan kedua kelompok besar Salafi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Indonesia dalam proses demokrasi menuntut seluruh masyarakat untuk bekerjasama sebagai salah satu bentuk partisipasi politiknya. Setiap masyarakat berhak untuk berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam menentukan pilihannya, termasuk Kaum Salafi. Bagaimana mereka menyeimbangkan antara kepentingan nasional melalui metode dakwahnya. Intinya seluruh masyarakat Indonesia termasuk Kaum Salafi memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam memilih.

Prinsip-prinsip negara demokrasi kemudian di tuangkan kedalam konsep yang lebih praktis, sehingga dapat diukur dan dicirikan. Afan Gaffar, merumuskan demokrasi menjadi lima indikator, maka diperlukan prasyarat untuk mengamati apakah suatu tatanan politik merupakan sistem demokrasi atau tidak.<sup>12</sup> *Pertama*, akuntabilitas, dimana seetiap pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggung jawabkan segala kebijakannya baik yang akan dilakukan maupun yang telah di implementasikan kepada masyarakat. *Kedua*, rotasi kekuasaan, harus dilakukan secara teratur dan damai.

*Ketiga*, rekrutmen terbuka, digunakan untuk menjalankan rotasi kekuasaan. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang di pilih rakyat mempunyai kesempatan yang sama. *Keempat*, menikmati hak-hak dasar. Dalam negara yang demokratis, setiap masyarakat dapat menikmati hak-

---

<sup>12</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 7-8



hak dasar mereka secara bebas, seperti hak untuk berpendapat digunakan untuk menentukan preferensi politiknya, hak untuk berkumpul atau berserikat ditandai dengan kebebasan menentukan lembaga atau organisasi yang dibentuk serta dipilihnya. Perlu adanya pembatasan kajian dalam skripsi ini meliputi pandangan dan tanggapan kaum salafi tentang pemilu, Gender, dan HAM sebagai tolak ukur demokrasi sehingga mengetahui sikap atau partisipasi politik kaum Salafi.

Pemilihan umum merupakan sebuah metode dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memilih perwakilan rakyat sebagai pembuat kebijakan dan memilih pemimpin untuk menjalankan hukum serta kebijakan yang dibuat oleh perwakilan rakyat tersebut. Dalam pemilihan umum keputusannya tertinggi diserahkan kepada suara mayoritas masyarakat. Suara mayoritas inilah yang dianggap oleh kaum Salafi bukan kehendak dari Tuhan karena suara masyarakat belum tentu menjamin para pemimpin yang terpilih untuk tidak berbuat kesalahan dan kesesatan. Solusi untuk memecahkan persoalan umat Islam menurut kaum Salafi adalah dengan kembali pada Al-Qur'an dan Hadits. Secara konseptual kaum Salafi menggunakan istilah *hizb* untuk menamakan atau menyebut kelompok partai sebagai gerakan politik yang tujuan utamanya kekuasaan bukan dakwah.

Cara berdakwah melalui *hizb* tidak ada landasan hukumnya dan tujuan utama berdakwah diabaikan. Indikator demokrasi selanjutnya ialah kebebasan ber ekspresi selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam undang-undang telah dijelaskan bahwasannya setiap warga negara berhak memeluk agama, memperoleh pendidikan dan tempat tinggal yang layak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Prinsip-prinsip demokrasi yang telah di jabarkan di latar belakang masalah diatas, dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi disuatu negara. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut juga digunakan sebagai tolak ukur fokus kajian penelitian ini. Realitas-realitas konsekuensi demokrasi diatas membutuhkan tanggapan dari kaum Salafi untuk mengerucutkan ideologi berpikir kaum Salafi dari segi teori realitas dalam demokrasi.

Pada buku elaborasi hasil penelitian Sefriyono yang berjudul Gerakan Kaum Salafi, di jelaskan bahwa terdapat dua kelompok kaum Salafi yang ada di Kota Padang, yaitu Salafi Yamani dan Salafi Sururi, dimana kedua kelompok ini berbeda dalam menanggapi isu tentang demokrasi. Kelompok Salafi Sururi dijelaskan lebih gencar mendakwahkan manhaj salaf di Kota Padang dan memiliki kedekatan dengan salah satu partai politik berasaskan Islam, sedangkan kelompok Salafi Yamani lebih tertutup dalam berdakwah dan berpolitik, namun keduanya sama-sama memiliki sebuah yayasan yang terstruktur dan terorganisir. Sehingga hal tersebut membuat peneliti tertarik melihat bagaimana sebenarnya perilaku politik dan partisipasi politik kedua kelompok Salafi ini dalam merespon demokrasi di Kota Padang.<sup>13</sup>

Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwasannya kaum Salafi di Kota Padang sudah terstruktur atau terorganisir, dimana kaum salafinya lebih moderat. walaupun mereka beranggapan bahwasannya yayasan yang di bangun bukanlah

---

<sup>13</sup> Sefriyono. Op.cit

sebuah organisasi atau kelompok tertentu untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Kaum Salafi perspektif pemikirannya masih banyak dipertentangkan oleh banyak kalangan.

Kehidupan politik kaum Salafi dalam model demokrasi perlu dipertanyakan ulang bahkan dikaji secara mendalam. Berdasarkan realitas diatas, peneliti mengupas secara mendalam ruang gerak dakwah Salafi dalam pemikiran politik, bahkan implikasi pemikiran politiknya dalam bingkai demokratis di Indonesia. Sehingga peneliti mengangkat judul “Demokrasi Dalam Islam Menurut Pandangan Kaum Salafi Di Kota Padang Sumatera Barat )”.

Dan dari penjabaran diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perilaku politik kaum Salafi Kota Padang terhadap Demokrasi ?
- b. Bagaimana partisipasi politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Kota Padang ?

### **1.3 Tujuan**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti susun, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mendeskripsikan perilaku politik Kaum Salafi terhadap Demokrasi di Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Politik Kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Kota Padang.

#### 1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan secara umum.

1. Secara akademis, Penelitian ini di harapkan akan membuka cakrawala baru dalam studi ilmu politik Islam, khususnya dalam memperkaya perbendaharaan pengetahuan dalam studi politik Islam mengenai perilaku politi kaum Salafi (respon terhadap demokrasi di Kota padang).
2. Secara praktis, Penelitian ini di harapkan memberikan informasi dan sebagai rujukan bagi organisasi publik ataupun individu mengenai demokrasi dalam Islam. Selain itu penelitian ini di harapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis.

